

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2025

*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. PADANG LAWAS UTARA*



*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
JL. LINTAS GUNUNGTUA - PADANGSIDIMPUAN KM.3
TELP. (0635) 5110003 FAX (0635) 5110003, EMAIL : SATPOLPPPALUTA@GMAIL.COM*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diselesaikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026. Dengan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara telah mempunyai panduan, pedoman dan acuan tentang arah kebijakan pembangunan kedepan yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam merumuskan tujuan, arah kebijakan strategi dan sasaran kinerja.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Perubahan Renja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, masukan dan saran-saran akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara yang lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang.

Gunung Tua, 28 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

INDRA SARUTRA NASUTION, S.STP. MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19821101 200112 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP sampai Triwulan II.	7
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	14
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Satpol PP	16
3.3 Program dan Kegiatan	18
BAB IV. PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD sampai Triwulan II Tahun Berjalan	8
Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran Renstra Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	17
Tabel 3.2. Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Ranwal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara keseluruhan terdiri dari Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Ranwal Renja. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Ranwal Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Ranwal Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026. Adapun Renja sendiri adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan Perangkat Daerah, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 akan menjadi pedoman dan indikator penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025 beserta pendanaan indikatifnya dengan mengakomodir semua usulan stakeholder. Rancangan Perubahan Rencana Kerja untuk tahun 2025 ini telah mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi maupun daerah yang mengacu kepada RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 serta kondisi perekonomian sampai saat ini. Karenanya bila terjadi perubahan arah kebijakan dan perkembangan kondisi perekonomian baik nasional maupun daerah maka Renja perlu ditelaah kembali agar dapat up to date dengan kebutuhan riil di lapangan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai seperti yang dicita-citakan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.
16. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara
17. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dengan maksud :

1. Menentukan program dan kegiatan Pembangunan daerah tahun 2025 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan Pembangunan daerah tahun 2025
3. Terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

1. Sebagai acuan atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara setiap tahunnya;

3. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
4. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
5. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara dan;
6. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP sampai Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP
- 1.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI TRIWULAN II

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sampai Triwulan II

Pelaksanaan Program/ kegiatan di Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam hal pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas berdasarkan pembobotan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efisiensi, dan efektivitas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik analisis berikut :

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024- 2029		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 =7+13	15	16										
			URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASA																						
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																						
1	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Satuan Polisi Pamong praja	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			0	976,536,752	-	771,606,300	55	182,325,253	10	166,188,701	-	-	-	-	65	345,513,954	260	1,322,050,706	#DIV/0!	44.78%	
1.1		1.05.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Daerah			5	53,750,000	100%	18,609,000	1	3,000,000	1	9,000,000	0	0	0	0	2	9,000,000	7	62,750,000	200.00%	48.36%	
1.1.1			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			4	49,800,000	4	18,000,000	1	3,000,000	1	6,000,000	-	-	-	-	2	9,000,000	6	58,800,000	0.5	50.00%	
1.1.2		1.05.01.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	3,950,000	2	609,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,950,000	0	0.00%		

No	Sasara n	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024- 2029		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 =7+13		15		16	
1.2		1.05.01.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum			136	433,760,657	100%	201,983,900	41	44,668,065	1	58,450,000	0	0	0	0	42	103,118,065	178	536,878,722	4200.00%	51.05%	
1.2.1			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	185,417,000	4	62,924,300	1	24,458,500	1	58,450,000	-	-	-	-	2	82,908,500	6	268,325,500	50.00%	131.76%		
1.2.2			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	13,100,000	4	5,609,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13,100,000			0.00%	0.00%	
1.2.3			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	19,810,000	4	7,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19,810,000			0.00%	0.00%	
1.2.4			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		4	18,000,000	4	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18,000,000			0.00%	0.00%	
1.2.5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120	197,433,657	160	108,030,000	40	20,209,565	-	-	-	-	-	-	40	20,209,565	160	217,643,222	25.00%	18.71%		
1.3		1.05.01.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26	223,728,000	100%	281,610,000	6	88,980,000	2	40,915,000	0	0	0	0	8	129,895,000	34	353,623,000	800.00%	46.13%		
1.3.1		1.05.01.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11	214,578,000	6	272,460,000	2	86,550,000	2	40,915,000	-	-	-	-	4	127,465,000	15	342,043,000	66.67%	46.78%		
1.3.2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15	9,150,000	15	9,150,000	4	2,430,000	-	-	-	-	-	-	4	2,430,000	19	11,580,000	26.67%	26.56%		

No	Sasara n	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024- 2029		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.4		1.05.01.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26	257,398,095	100%	253,811,700	7	45,677,188	6	57,823,701	0	0	0	0	13	103,500,889	39	360,898,984	1300.00%	40.78%		
1.4.1		1.05.01.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2	10,000,000	3	5,330,000	2	4,670,000	-	-	-	-	-	-	2	4,670,000	4	14,670,000	66.67%	87.62%		
1.4.2		1.05.01.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	89,275,295	12	90,358,900	3	23,007,188	3	21,823,701	-	-	-	-	6	44,830,889	18	134,106,184	50.00%	49.61%		
1.4.3		1.05.01.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	158,122,800	12	158,122,800	2	18,000,000	3	36,000,000	-	-	-	-	5	54,000,000	17	212,122,800	41.67%	34.15%		
1.5		1.05.01.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	7,900,000	100%	15,591,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7,900,000	0.00%	0.00%		
1.5.1		1.05.01.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	3,950,000	4	14,982,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,950,000	0.00%	0.00%		
1.5.2		1.05.01.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	3,950,000	2	609,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,950,000	0.00%	0.00%		
Rata- Rata Capaian Kinerja																		#DIV/0!							
Predikat Kinerja																									

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ko ta pada Tahun 2024- 2029		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perang kat Daerah Penan ggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14 =7+13		15		16							
2	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.06.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		0	5,893,037,000	100%	5,471,522,700	5	1,086,310,000	132	1,853,270,000	0	0	0	0	137	2,939,580,000	173	8,832,617,000	13700.00%	53.73%	SATUAN POLISI PAMO NG PRAJA	
2.1		1.05.02 .1	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Poyelesaian Potensi Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SOP		28	5,860,124,000	100%	5,439,113,000	5	1,086,310,000	132	1,853,270,000	0	0	0	0	137	2,939,580,000	165	8,799,704,000	13700.00%	54.05%		
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Mayarakat				4	32,100,000	-	-	4	31,350,000	-	-	-	-	4	31,350,000	4	31,350,000	100.00%	97.66%		
2.1.1			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		4	2,126,570,000	8	2,121,415,500	2	387,560,000	2	691,600,000	-	-	-	-	4	1,079,160,000	8	3,205,730,000	50.00%	50.87%		
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				120	125,854,500	-	-	120	123,770,000	-	-	-	-	120	123,770,000	120	123,770,000	1	98.34%		
2.1.2			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		4	439,504,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	439,504,000	#DIV/0!	#DIV/0!			

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ko ta pada Tahun 2024- 2029		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perang kat Daerah Penan ggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7	Rp	8	Rp	9		10	Rp	11		12		13	Rp	14 =7+13		15	Rp	16
2.1.3			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			20	3,294,050,000	12	3,058,800,000	3	698,750,000	3	960,550,000	-	-	-	-	6	1,659,300,000	26	4,953,350,000	0.5	54.25%	
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan					10	100,943,000	-	-	3	46,000,000	-	-	-	-	3	46,000,000	3	46,000,000	0.3	45.57%	
2.2		1.05.02 .2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penyelesaian Potensi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota			8	32,913,000	100%	32,409,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	32,913,000	0.00%	0.00%	
2.2.1			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			8	32,913,000	10	32,409,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	32,913,000	0	0.00%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																			66.67%						
Predikat Kinerja																			Rendah						

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ko ta pada Tahun 2024- 2029		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perang kat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 =7+13		15		16
3	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.06.03	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN ,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			0	2,991,126,457	100%	3,000,000,000	100	468,303,000	100	1,128,500,000	-	-	-	-	200	1,596,803,000	600	4,587,929,457	200	53.23%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	3.1	1.06.03.2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			400	2,991,126,457	100%	3,000,000,000	100	468,303,000	100	1,128,500,000	-	-	-	-	200	1,596,803,000	600	4,587,929,457	200	53.23%	
3.1.1		1.06.03.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			400	2,991,126,457	400	3,000,000,000	100	468,303,000	100	1,128,500,000	-	-	-	-	200	1,596,803,000	600	4,587,929,457	0.5	53.23%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																			0.00%						
Predikat Kinerja																									

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi yang memerlukan dukungan Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu penerapan pelayanan publik di daerah, penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Sebagaimana diketahui bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian penting dari sistem manajemen Pemerintahan Daerah. Salah satu Kebijakan Nasional adalah Pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu kebijakan dalam RPJP 2005-2025.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 diarahkan pada “Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka mendukung percepatan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Pusat Dan Daerah. Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”. Dan kebijakan pembangunan tahun 2025 diarahkan pada tema *“Penguatan Sinergi Pusat Dan Daerah Dalam Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*.

Berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam pelaksanaan Pembangunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan pencapaian sasaran pokok Visi Misi RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2045 pada periode tahap akhir. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, Provinsi Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (empat) prioritas

pembangunan dan 40 (empat puluh) Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Empat prioritas pembangunan dan empat puluh kegiatan strategis daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah merupakan wujud dukungan terhadap arah kebijakan Pembangunan nasional yang diwujudkan dalam *Major Project (MP)*, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

Dalam mewujudkan keselarasan pembangunan dan memaksimalkan pencapaian pembangunan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai bagian dan satu kesatuan pembangunan di lingkup Provinsi Sumatera Utara, maka keberhasilan pembangunan Provinsi juga dipengaruhi oleh dukungan dan keberhasilan pembangunan dari daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam tiga tahun kedepan,. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama tiga tahun kedepan. Selanjutnya pada tingkat kabupaten, pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan ditetapkan dengan beberapa sasaran pembangunan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju.
4. Mewujudkan Keberkelanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta pelayanan yang prima.
2. Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatnya Infrastruktur Dasar.
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Utara maka Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan harus mengakomodasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkret dan logis yang ingin dicapai di masa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini akan mengakibatkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Adapun tujuan Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tertuang dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024- 2026 adalah “Mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”, dengan indikator tujuan Persentase Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat yang ditangani

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Sasaran Renja Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAM	TARGETKINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -		
				2024	2025	2026
1	Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih di Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Satuan Polisi Pamong praja	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satpol PP	64,27	69,27	74,27
			2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00	86,00	88,00
		Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	90	95	100
			2 Tingkat waktu tanggap (respons time rate) Penanganan Kebakaran	84	87	90

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan kota serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan program, kegiatan seperti tabel dibawah ini :

TABEL 3.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								12.905.448.830,00	12.892.574.110,00	13.043.402.090,00	137.953.260,00						9.654.007.957,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.905.448.830,00	12.892.574.110,00	13.043.402.090,00	137.953.260,00							9.654.007.957,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12.905.448.830,00	12.892.574.110,00	13.043.402.090,00	137.953.260,00							9.654.007.957,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip				BB Predikat	BB Predikat	4.275.817.330,00	4.256.398.910,00	3.820.779.390,00	2.738.190.627,00							7.014.007.957,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	2 Dokumen	31.960.600,00	31.960.600,00	15.591.700,00	-16.368.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		8.265.625,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	27.898.100,00	27.898.100,00	14.982.700,00	-12.915.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			4.265.625,00	SATUAN POLISI PAMON G PRAJA	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.062.500,00	4.062.500,00	609.000,00	-3.453.500,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMON G PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Satpol PP				100 Persen	100 Persen	3.159.101.230,00	3.019.682.810,00	2.887.282.090,00	-271.819.140,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Satuan Polisi Pamong Praja		3.422.271.932,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/ bulan	37 Orang/ bulan	3.137.038.730,00	2.997.620.310,00	2.866.973.090,00	-270.065.640,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.347.521.932,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	19.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			70.720.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.062.500,00	4.062.500,00	609.000,00	-3.453.500,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			4.030.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawain				100 Persen	100 Persen	585.373.800,00	585.373.800,00	331.983.900,00	-253.389.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Saluan Polisi Pamong Praja		239.948.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	214.467.500,00	214.467.500,00	181.598.900,00	-32.868.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18.430.000,00	18.430.000,00	5.609.600,00	-12.820.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			14.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.845.300,00	19.845.300,00	7.419.400,00	-12.425.900,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			20.548.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	160 Laporan	314.631.000,00	314.631.000,00	119.356.000,00	-195.275.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan				100 Porsen	100 Porsen	258.481.700,00	258.481.700,00	253.811.700,00	-4.670.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Satuan Polisi Pamong Praja	3.044.412.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.330.000,00	-4.670.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		8.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.358.900,00	90.358.900,00	90.358.900,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		36.262.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	158.122.800,00	158.122.800,00	158.122.800,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	240.900.000,00	360.900.000,00	332.110.000,00	91.210.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Satuan Polisi Pamong Praja		114.110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	231.750.000,00	351.750.000,00	322.960.000,00	91.210.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	5.629.631.500,00	5.636.175.200,00	5.757.023.000,00	-5.214.631.500,00							415.000.000,00		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Potensi Penanganan Gangguan ketertaman dan ketertiban umum sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	5.603.765.500,00	5.603.765.500,00	5.519.409.900,00	-84.355.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	54.900.000,00	54.900.000,00	33.600.000,00	-21.300.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				8 Dokumen	8 Dokumen	2.143.144.500,00	2.143.144.500,00	2.121.415.500,00	-21.729.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																			
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				120 Orang	120 Orang	237.137.000,00	237.137.000,00	125.854.500,00	-111.282.500,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	12 laporan	3.036.000.000,00	3.036.000.000,00	3.137.596.900,00	101.596.900,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Laporan	10 Laporan	132.584.000,00	132.584.000,00	100.943.000,00	-31.641.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Potensi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				100 Persen	100 Persen	25.866.000,00	32.409.700,00	237.613.100,00	211.747.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kabupaten Padang Lawas Utara		95.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				10 Laporan	10 Laporan	25.866.000,00	32.409.700,00	237.613.100,00	211.747.100,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-			-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100 Persen	100 Persen	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.465.599.700,00	-775.000.000,00							2.225.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditanggulangi sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		190.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen NSPM Pen- cegahan/Penanggulan- gan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evak- uasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																			
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	<i>Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>				100 Persen	100 Persen	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.465.599.700,00	465.599.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		2.035.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya</i>				400 Orang	400 Orang	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.465.599.700,00	465.599.700,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya</i>				0 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		J U M L A H							12.905.448.830,00	12.892.574.110,00	13.043.402.090,00	137.953.260,00							9.654.007.957,00	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dan Renstra Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 kami susun secara objektif dan dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Gunung Tua, 28 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

INDRA SAPUTRA NASUTION, S.STP. MM
PEMBINA TK. I
NIP. 198211012001121002